

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut (Sukirno, 2005: 445), pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah dan struktur perekonomian yang seimbang.

Menurut Todaro dan Smith, (2003) termasuk dalam (Arsyad, 2010:11), bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*Sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*Self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*Freedom From Servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Dalam bukunya, (Arsyad, 2010: 374) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem negara

dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan mencukupi kesejahteraan masyarakat.

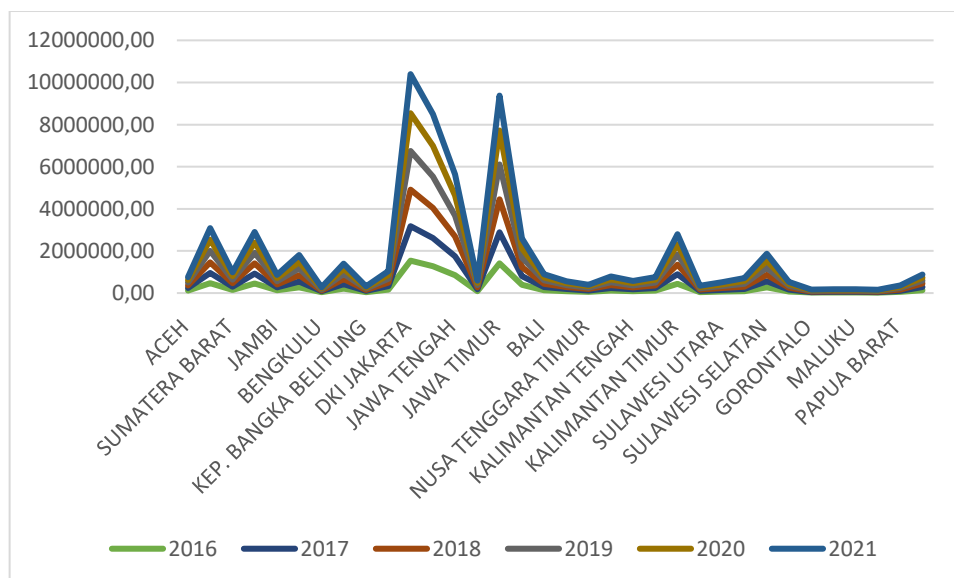
Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing provinsi di Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era otonomi daerah di mana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi yang ada. Salah satu indikator pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di antaranya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan peningkatan produksi barang dan jasa, serta merupakan indikator untuk menentukan status ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan suatu negara diharapkan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas faktor produksi, sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat pada tingkat pemerataan yang baik. Untuk

mengetahui tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu dipublikasikan statistik pendapatan negara secara berkala.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian yang telah dilakukan oleh pemerintah di suatu wilayah dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi daerah disertai dengan pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa resesi akan menghasilkan kondisi harga yang stabil dan lapangan kerja yang luas. Namun pada kenyataannya, kondisi perekonomian masing-masing daerah pada umumnya mengalami pasang surut.

Nilai PDRB menjadi sebagai tolak ukur tingkat pembangunan ekonomi di setiap daerah, terlihat dari output yang dihasilkan di 34 Provinsi di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia, 2016-2021

Gambar 1. PDRB ADHK 2010 menurut Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016 -2021 (Milyar)

Dalam Gambar 1. menurut PDRB ADHK 2010 setiap Provinsi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut di dorong oleh makin tingginya kinerja pemerintah untuk meningkatkan perekonomian setiap provinsi di Indonesia. Dimana perkembangan PDRB di setiap provinsi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kontraksi perekonomian yang terjadi pada seluruh komponen PDRB dikarenakan tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan pandemi *Covid-19* sehingga menurunkan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021 perekonomian di daerah kembali membaik karena dipengaruhi oleh peningkatan pelonggaran status PPKM sehingga masyarakat kembali beraktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Nilai PDRB peringkat tertinggi berada pada tiga provinsi di Indonesia yaitu posisi pertama provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 2020 provinsi tersebut mengalami penurunan yaitu DKI Jakarta sebesar Rp. 1.792.403,43 milyar kemudian meningkat dan menjadi nilai tertinggi pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.856.301,41 milyar yang mana DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi dan bisnis. Kedua, provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.611.507,78 milyar kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.669.116,89 milyar. Dan untuk posisi ketiga yaitu provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.453.380,72 milyar kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.507.746,39 milyar. Dimana perekonomian di setiap provinsi terus berkembang karena banyaknya faktor yang mendorong pertumbuhan PDRB sehingga pemerintah terus

mengeluarkan strategi kebijakan dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi *Covid-19*.

Untuk posisi nilai PDRB dengan predikat tiga terendah provinsi di Indonesia yaitu Maluku Utara, Gorontalo dan Maluku. Dimana perbedaan perkembangan perekonomian penyebab tiga provinsi tersebut menjadi provinsi dengan nilai PDRB terendah di Indonesia. Pertama, perkembangan PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu, untuk Maluku Utara sebesar Rp. 28.020,67 milyar kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 32.615,10 milyar. Kedua, Gorontalo pada tahun 2020 sebesar Rp. 28.425,21 milyar kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 29.109,96 milyar. Dan untuk provinsi Maluku pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.765,27 milyar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 31.700,76 milyar. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan PDRB diperlukan analisis pengaruh dan faktor-faktor apa saja sebagai usaha dalam mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB di setiap provinsi.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB terdapat banyak faktor yang mempengaruhi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Tenaga Kerja. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB diantaranya Pengeluaran Pemerintah Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja.

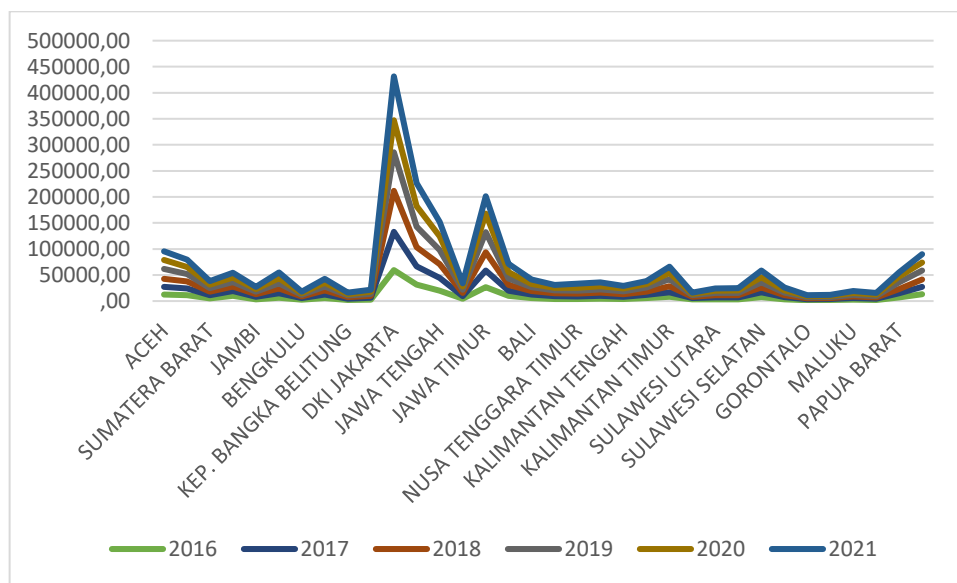
Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Upaya untuk mengembangkan perekonomian diperlukan juga peranan pengeluaran pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber daya dan distribusi pendapatan konsumen untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Rustiono, 2008).

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi lewat instrumen pengeluaran pemerintah untuk

menggerakkan pertumbuhan ekonomi guna untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi ekonomi negara maupun sosial dalam rangka peningkatan layanan publik atau mensejahterakan masyarakatnya.

Gambar 2. merupakan Gambar realisasi pengeluaran pemerintah pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia, 2016-2021

**Gambar 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)**

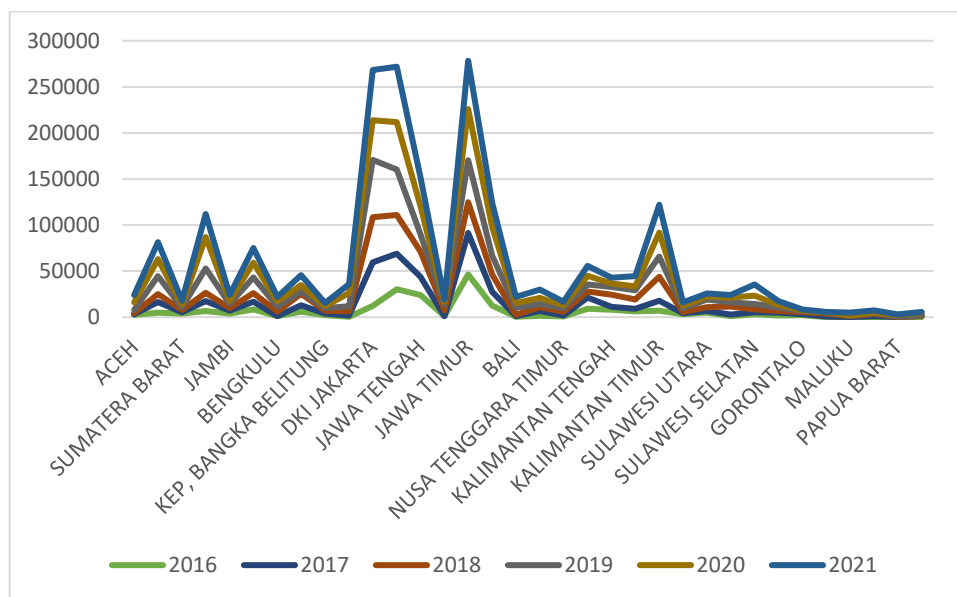
Berdasarkan Gambar 2. realisasi pengeluaran pemerintah di setiap Provinsi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan pengeluaran pemerintah pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan di setiap provinsi di Indonesia yang mana disebabkan oleh defisit yang sejalan dengan perubahan yang terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB.

Adapun tiga provinsi tertinggi nilai pengeluaran pemerintahan yaitu pertama, pengeluaran pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp. 61.469,82 juta kemudian kembali meningkat dan menjadi nilai tertinggi pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 84.196,59 Juta. Kedua, pengeluaran pemerintah Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.376,32 juta kemudian meningkat pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp. 44.715,07 juta. Ketiga, pengeluaran pemerintah Jawa Timur dimana pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.022,54 juta dan pada 2021 sebesar Rp. 33.044,3 juta. Sehingga posisi tertinggi pengeluaran pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi *Covid-19* yaitu sebesar Rp. 38.411,06 Juta.

Kemudian untuk predikat tiga provinsi dengan pengeluaran pemerintah provinsi terendah yaitu Pertama, pengeluaran pemerintah di provinsi Gorontalo pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 Rp. 1.948,83 juta kemudian kembali menurun pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.922,52 juta. Sehingga pengeluaran tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2.002,2 juta sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Kedua, pengeluaran pemerintah provinsi Sulawesi Barat sama halnya dengan provinsi Gorontalo yang mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yang mana pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.140,48 juta kemudian kembali menurun pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.108,77 juta. Sehingga pengeluaran tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.164,14 juta sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Ketiga, pengeluaran pemerintah Maluku Utara dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.750,14 juta kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp. 3.379,04 juta. Sehingga pengeluaran

pemerintah mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pengeluaran pemerintah di sektor publik perlu mendapatkan perhatian lebih berkaitan pada pelaksanaan program/kegiatan pemerintah. Karena, berbagai program pelayanan publik yang diciptakan, dipilih dan didukung pemerintah pasti memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas ekonomi daerah sampai negara. Yang nantinya berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, variabel yang mendorong pertumbuhan PDRB adalah Investasi. Bentuk investasi berikutnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia, 2016-2021

Gambar 3. Jumlah Investasi PMDN Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

Investasi memiliki peranan penting dalam teori pertumbuhan, sehingga sering disebut dengan *Engine Of Growth*. Kenaikan pertumbuhan, tentunya tidak lepas

dari peranan investasi yang ditanamkan di setiap wilayah. Investasi atau penanaman modal oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal oleh pihak asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional.

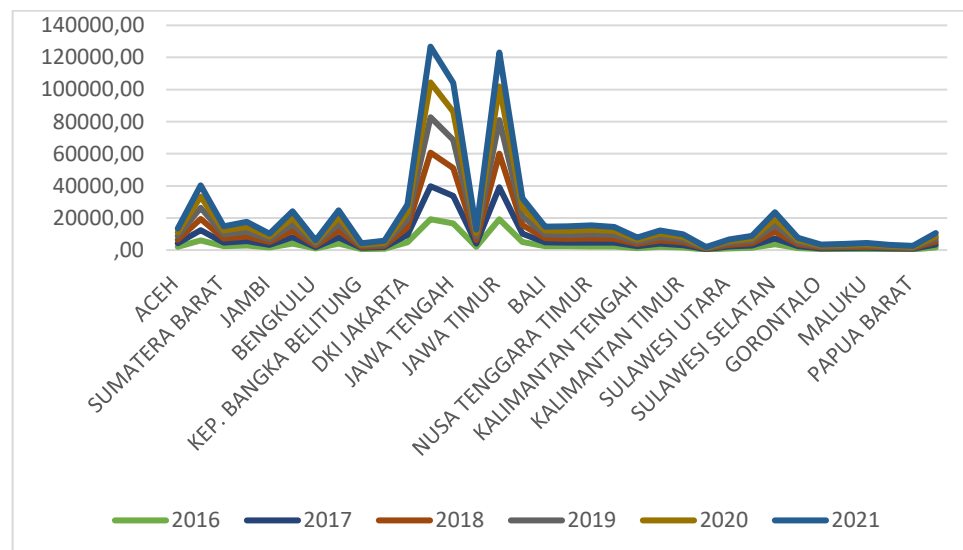
Berdasarkan Gambar 3. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, artinya mengalami peningkatan dan penurunan di setiap provinsi pada tahun ke tahunnya. Penanam modal yang dilakukan oleh para investor di delapan sektor dari satu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah-ubah karena investor hanya menanamkan modal di sektor ekonomi yang diinginkan. Selain itu kondisi dari perekonomian dunia, kondisi ekonomi dan politik dalam negeri, tuntutan upah dan minimnya infrastruktur juga dengan adanya pandemi *Covid-19* dalam dua tahun terakhir menyebabkan nilai PMDN di provinsi setiap tahunnya mengalami perubahan.

Dimana tiga provinsi dengan PMDN tertinggi di provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur yang mana mengalami peningkatan setiap tahunnya nilai PMDN tertinggi yaitu pada tahun 2020 Rp. 55.660,6 milyar namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 52.552,2 milyar . Kedua, PMDN provinsi Jawa Barat yaitu mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.400,5 milyar namun mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2021 sebesar menjadi Rp. 59.948,5 milyar. Ketiga, PMDN provinsi DKI Jakarta yang mana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.954,7 milyar dan kembali meningkat secara signifikan yaitu menjadi sebesar Rp. 54.708,2 milyar.

Kemudian untuk tiga provinsi dengan PMDN terendah di provinsi yaitu pertama, provinsi Papua Barat mengalami peningkatan di setiap tahun nya dimana PMDN pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.925,4 milyar namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp. 635,6 milyar. Kedua, provinsi Maluku yang mana mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 283,2 milyar namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 474,8 milyar dan meningkat secara drastis pada tahun 2021 yang mana menjadi sebesar Rp. 2.939,7 milyar. Kemudian ketiga, provinsi Sulawesi Barat dimana mengalami penurunan pada dua tahun terakhir pada tahun 2020 sebesar Rp. 252,9 Milyar dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 395,3 Milyar. Untuk itu, Investasi merupakan unsur penting dalam mendukung perekonomian. Penyelesaian investasi dan produksi berupa penambahan barang modal untuk meningkatkan kapasitas produksi barang serta jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga pada berdampak peningkatan PDRB dan berdampak positif bagi perekonomian.

Selain Pengeluaran Pemerintah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mempengaruhi PDRB yaitu Tenaga Kerja. Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah ataupun kota mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah.

Dimana teori pertumbuhan menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, di mana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan perekonomian secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Pembangunan daerah diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia, 2016-2021

Gambar 4. Tenaga Kerja Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021 (Juta Jiwa)

Berdasarkan Gambar 4. Jumlah tenaga kerja di setiap Provinsi di Indonesia tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, dimana masih mengalami kenaikan maupun

penurunan setiap tahunnya. Jika hal ini, tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, karena tenaga kerja pada dasarnya yang menggerakkan perekonomian. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 yang mana disebabkan kontraksi dari adanya pandemi *Covid-19* sehingga tenaga kerja dibatasi karena pembatasan kegiatan sosial atau PPKM yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial terganggu secara keseluruhan. Termasuk gangguan di pasar tenaga kerja sehingga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada penarikan jumlah tenaga kerja maupun PHK dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah.

Dimana tiga provinsi dengan tenaga kerja tertinggi yaitu pertama, provinsi Jawa Barat yang mana pada tahun 2020 sebesar 21.674,85 juta jiwa kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 22.313,48 juta jiwa. Kedua, provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 20.962,97 juta jiwa kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 21.037,75 juta jiwa. Ketiga, provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 17.536,94 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 17.835,77 juta jiwa. Kenaikan pada 2021, disebabkan karena sudah ada pembebasan atau pelanggaran PPKM sehingga para tenaga kerja bisa kembali bekerja namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kemudian tiga provinsi dengan tenaga kerja terendah yaitu provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan Maluku Utara. Ketiga provinsi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021 meskipun pada tahun 2020 adanya

pandemi *Covid-19* di setiap provinsi tidak begitu pengaruh karena perbedaan aktivitas perekonomian yang masih relatif sedikit sehingga bisa mengatasi pandemi tersebut dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Provinsi tersebut tetap konsisten dilihat dari peningkatan tenaga kerja meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Dengan begitu, tenaga kerja yang optimal mampu mengatasi tingkat pengangguran serta mendorong pembangunan PDRB dan perekonomian yang maju.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan mampu untuk melihat berapa besar pengaruh yang disebabkan oleh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui nilai tambah PDRB. Sehingga melalui hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan faktor-faktor yang terkait tersebut dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB PROVINSI DI INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021 ?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh di setiap Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan bagi pemerintah maupun masyarakat tentang kondisi perekonomian yang sedang berjalan.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi sama.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengefektifkan informasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis melalui pengambilan data dari *website* Badan Pusat Statistik yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan, dilanjutkan dengan pengajuan dan penyerahan SK bimbingan, kemudian konsultasi terkait judul yang terkait dengan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan proses bimbingan. Kemudian mengajukan bahwa layak untuk diseminarkan pada tanggal 15 Februari 2023. Dilanjutkan revisi usulan penelitian, analisis data, penyusunan skripsi dan sidang skripsi sebagai penutup pada tanggal 15 Juni 2023. Berikut matriks jadwal penelitian ini:

